

RINGKASAN

Pemekaran daerah diatur dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah nomor 78 tahun 2007, dengan adanya aturan tersebut maka banyak daerah yang mengusulkan pemekaran yang juga dilakukan oleh masyarakat ciamis melalui Presidium Pembentukan Kabupaten Pangandaran (P2KP) sebagai wadah aspirasi masyarakat ciamis selatan yang ingin meningkatkan kesejahteraan dan juga mempermudah masyarakat dalam urusan administrasi, karena rentang kendali yang cukup jauh dan proporsi APBD ciamis yang dianggap tidak mementingkan sektor belanja publik, sehingga pemekaran dianggap solusi terbaik terhadap permasalahan yang ada diwilayah ciamis selatan.

Presidium Pembentukan Kabupaten Pangandaran (P2KP) adalah organisasi masyarakat yang dibentuk dengan tujuan untuk memperjuangkan pemekaran kabupaten Ciamis. Perjuangan yang dilakukan P2KP melalui proses yang cukup panjang sehingga penelitian ini merupakan upaya untuk mengetahui proses pembentukan Kabupaten Pangandaran dan juga mengetahui faktor keberhasilan P2KP dalam mewujudkan Kabupaten Pangandaran.

Penelitian ini menjelaskan bahwa Presidium Pembentukan Kabupaten Pangandaran (P2KP) dari sudut pandang politik dan juga sosiologi, dari sisi politik P2KP bisa dibilang sebagai kelompok kepentingan dan juga kelompok penekan dan dari segi sosiologi P2KP merupakan bentuk gerakan sosial. Kelompok kepentingan, penekan dan juga gerakan sosial yang dilakukan oleh P2KP ini memiliki tujuan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat yaitu pembentukan Kabupaten Pangandaran. Hal tersebut dilihat dengan adanya dukungan dari masyarakat yang ditunjukkan melalui surat dukungan yang dikeluarkan oleh BPD dari 92 desa yang akan menjadi calon Kabupaten Pangandaran yang kemudian diserahkan kepada DPR yang sebelumnya telah mendapatkan persetujuan DPRD, Bupati, DPRD prov, Gubernur untuk dapat disahkan menjadi daerah otonom baru dengan persetujuan Presiden. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif melalui pendekatan fenomenologi yang datanya diperoleh dari wawancara, observasi dan data sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian ini, pemekaran daerah yang dilakukan oleh Presidium Pembentukan Kabupaten Pangandaran (P2KP) didasarkan pada kepentingan untuk kesejahteraan rakyat seperti mendekatkan pelayanan pada masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meminimalisir kepentingan politik baik individu maupun kelompok.

Kata Kunci: Gerakan Sosial, Pemekaran, Pangandaran.

SUMMARY

Regional division is regulated in Law number 32 year 2004 and Government Regulation number 78 year 2007, with the existence of the regulation so many area proposed pemekaran also done by society of ciamis through Presidium Pembentukan Kabupaten Pangandaran (P2KP) as container of aspiration of south ciamis community want to improve the welfare and also facilitate the public in administrative matters, because the range of control is far enough and the proportion of budget ciamis that is considered not concerned with public expenditure sector, so that pemekaran is considered the best solution to the problems that exist in the region south ciamis.

Presidium The establishment of Pangandaran Regency (P2KP) is a community organization formed with the aim to fight for the expansion of Ciamis regency. The struggle made by P2KP through a long process so that this research is an effort to know the process of forming Pangandaran Regency and also know the success factor of P2KP in realizing Pangandaran Regency.

This research explains that the Presidium of Pangandaran Regency Formation (P2KP) from political and sociological point of view, from political side of P2KP can be regarded as interest group and also pressure group and sociology of P2KP is a form of social movement. Interest groups, suppressors and social movements conducted by P2KP has a goal to fight for the public interest that is the establishment of Pangandaran Regency. It is seen with the support from the community which is shown through the letter of support issued by BPD from 92 villages that will become candidates of Pangandaran Regency which then submitted to the Parliament which previously had obtained the approval of DPRD, Bupati, DPRD prov, Governor to be legalized into autonomous region only with the approval of the President. The method used in this research is qualitative method through phenomenology approach which data obtained from wawancara, observation and secondary data.

Based on the results of this study, the expansion of the area undertaken by the Presidium of Pangandaran Regency Formation (P2KP) is based on the interest for the welfare of the people such as closer service to the community in order to improve the quality of public services and minimize the political interests of both individuals and groups.

Keywords: Social Movement, Regional Divisions, Pangandaran